

AJA NGERUBUHAKEN JAJANG SEBARONG¹

ROSDI BAHTIAR MARTADI
Pegiat di FOR Banyuwangi
E-mail: rosdi.bm@gmail.com

Berbeda dengan *Wikipedia* yang hanya sekilas saja mengulas tentang rujak soto, Tempo pada paruh awal bulan November 2016 menyajikan tulisan lebih detil tentang makanan khas Banyuwangi ini. Tak hanya menginformasikan bahan-bahannya, Tempo juga memaparkan cara pembuatan makanan yang menurut novelis Hasnan Singodimayan baru muncul pada dekade 1970-an²

Jika kita berselancar menggunakan mesin pencari Google, maka akan kita ketahui bahwa foto semangkuk rujak soto yang terpampang di laman Wikipedia tersebut tak hanya jadi ilustrasi tulisan Tempo. Beberapa blog menggunakan foto tersebut sebagai pengaya tulisan. Foto semangkuk rujak soto ini sebenarnya bisa jadi portal bagi kita untuk menemukan apa hubungan ekologi dan kebudayaan. Wa bil khusus ekologi dan kebudayaan Banyuwangi.

Bahan dan bumbu pembentuk rujak soto tersebut ibarat 7 unsur universal kebudayaan yang disarikan oleh Clyde Kluckhohn, sementara mangkok yang menjadi tempat rujak soto tersebut sebagai ekologi. Tentunya analogi ini bukan analogi mati, dalam artian baik rujak soto dan mangkoknya bukanlah sesuatu yang mati. Rujak soto dan mangkoknya sama-sama punya kekuatan untuk mempengaruhi. Keduanya saling berinteraksi.

Pengibaratan hubungan interaktif antara rujak soto dengan mangkoknya ini perlu disajikan sebagai pengantar untuk memahami hubungan antara kebudayaan sebagai hasil perilaku kompleks sekelompok manusia dengan ruang hidupnya (baca: ekologi). Atau untuk memahami kebudayaan dengan tempat lahirnya kebudayaan itu sendiri.

Setelah mendatangi dan bertanya kepada seratus lebih ahli antropologi, Kluckhohn menemukan sekian kesamaan-kesamaan jawaban dari para antropolog tersebut saat disodori pertanyaan: apakah kebudayaan itu? Sekian kesamaan itulah yang kemudian oleh Kluckhohn *cultural universal* (unsur kebudayaan universal). Unsur kebudayaan universal tersebut adalah:

1. Religi (sistem kepercayaan)
2. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan)
3. Sistem pengetahuan
4. Sistem ekonomi dan mata pencaharian
5. Peralatan dan perlengkapan hidup
6. Bahasa
7. Kesenian

Pengurutan unsur kebudayaan universal di atas merujuk kepada pendapat tokoh adat Desa Alas Malang Subur Bahri. Dalam sebuah sesi diskusi di tahun 2004, Subur yang juga staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17-8-1945 (Fisip Untag) Banyuwangi

¹ Disajikan dalam Sekolah Kritik Budaya Angkatan Kedua “Fokus Banyuwangi”, 14-15 April., diselenggarakan Matatimoer Institute, di Sanggar “Angklung Soren”, Banjarsari, Banyuwangi.

² Kompas.com, 16 Januari 2014, “Rujak Soto, Kuliner Nyentrik Khas Banyuwangi.”

tersebut menyatakan, pengurutan unsur kebudayaan universal itu menggambarkan tingkat kestabilan unsur tersebut. Menurutnya, jika diurutkan dari atas ke bawah, maka unsur kebudayaan universal yang nomer 7 yang paling mudah berubah, sementara kian ke atas kian sulit berubah.

Setelah menggunakan pendapat Kluckhohn sebagai pisau analisis untuk membedakan kompleksitas kebudayaan Banyuwangi, maka hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menelusur apa keterkaitan kebudayaan Banyuwangi dengan ekologi Banyuwangi adalah melihat bagaimana ruang hidup bernama Banyuwangi ini terhampar. Tentu bukanlah pekerjaan singkat untuk memperoleh gambaran tepat tentang sebuah ruang hidup bernama Banyuwangi ini. Hal ikwal menyangkut bentang alam (tinggi rendahnya sebuah kawasan secara tipografik) juga perlu dilihat, selain melihat *cash-flow* energi baik secara, penguasaan ruang juga perlu dikaji.

Secara ekologis, Banyuwangi berpotensi jadi rumah belajar ekologi yang apik. Inilah satu-satunya kabupaten di Pulau Jawa yang dikepung oleh 3 Taman Nasional, yakni Meru Betiri di sisi barat-selatan, Alas Purwo di sisi timur-selatan, dan Baluran di sisi utara.

Begitu pula dengan lanskap penyerap airnya. Jika kita berdiri pantai boom Banyuwangi, kemudian kita arahkan pandangan kita ke arah barat, maka lanskap tersebut akan terlihat. Dari utara berdiri Gunung Merapi Ungup-ungup, kemudian di sebelahnya Gunung Meranti, selanjutnya Gunung Pendil yang tampak berhimpit dengan Gunung Suket, dan yang paling ujung adalah Gunung Raung.

Lanskap tersebut yang telah sekian lama menjadi rumah bagi beberapa sungai. Keeratan hubungan lanskap tersebut dengan sungai ini pula yang kemudian membuat kita mahfum betapa banyaknya nama desa atau kelurahan di Banyuwangi yang mengandung unsur air, seperti Kedunggebang, Kedungasri, Sumberrejo. Bahkan lokasi benturan ekologis antara tambang emas dan Hutan Lindung Tumpang Pitu itu pun berlokasi di Desa Sumberagung (yang secara harfiah bermakna mata air yang besar).

Tak hanya penting untuk menelisik bagaimana begitu agraris-nya elemen-elemen ritual yang ada di Banyuwangi (khususnya ritual milik Using), menyusur dan menyimak sekian nama tempat atau nama desa juga penting. Hal ini karena toponim atau nama sebuah tempat bukan lahir dari sebuah ruang kedap yang nir-interaksi. Toponim tentu memiliki hubungan faktual dengan ekologi tempat yang bersangkutan. Ambil contoh, tidaklah mungkin nama Kedunggebang lahir dengan asal-asalan atau gegabah. Kedung adalah sebuah ceruk di sungai, sedangkan Gebang adalah nama sebuah tumbuhan. Tentulah penamaan Kedunggebang tidak mungkin lahir jika kawasan tersebut secara faktual tak memiliki Kedung dan Gebang.

Selain Toponim, menjadi penting pula menelisik perilaku kultural warga Banyuwangi terhadap ruang hidupnya (terutama perilaku yang secara tradisi diekspresikan dalam ritual). Sebagaimana halnya toponim, ritual juga bukanlah sesuatu yang lahir dari ruang kedap yang nir-proses. Ritual bisa jadi petunjuk bagaimana warga Banyuwangi (khususnya masyarakat Using) dalam berinteraksi dengan ruang hidupnya. Pemilahan antara pala pendem dan pala gumantung adalah contoh yang bisa dipaparkan di sini. Larangan untuk menanam pala

pendem (tanaman umbi-umbian) di *perengan* (lereng) adalah contoh bagaimana masyarakat Using bersikap terhadap bentang alam.

Tak hanya melarang menanam tanaman umbi-umbian di lereng. Sebagai bentuk upaya merawat lereng agar tak longsor, masyarakat Using dengan menanam Pohon Bendo (*Artocarpus elasticus*) dan Bambu di *perengan*. Pemerhati sejarah dan kebudayaan Using Suhali menyatakan, Bendo dan Bambu adalah dua jenis tanaman yang paling sering digunakan oleh masyarakat Using untuk meng-konservasi *perengan* dan bantaran sungai³. Senada dengan Suhali, pemerhati kebudayaan Using Abdullah Fauzi juga menyatakan, menanam bambu oleh masyarakat Using digunakan untuk merawat mata air yang sudah ada, atau pula untuk memancing munculnya mata air baru di bantaran kali⁴

Menurut Fauzi, bambu memiliki tempat istimewa di mata masyarakat Using tidak hanya karena posisi bambu sebagai bahan utama pembuatan alat musik angklung, tetapi juga sebagai penangkap air dan simbol kebersamaan. Ada pepatah berbunyi *aja ngerubuhkan jajang sebarong* (secara harfiah berarti: janganlah merobohkan bambu satu rumpun). Fauzi menyatakan pepatah tersebut adalah pengingat bagi masyarakat Using untuk menghindari tindakan yang merusak persaudaraan dan silaturahmi. Fauzi mencontohkan penggunaan pepatah tersebut dalam hal pernikahan. Masyarakat Using menurutnya, menghindari pernikahan antar saudara karena rawan merusak persaudaraan. Jika ada masalah, maka permasalahan yang awalnya hanya terlokasir di dalam rumah tangga suami-istri, jadi melebar jadi perpecahan keluarga. Makanya pesan *aja ngerubuhkan jajang sebarong* ini biasanya disampaikan oleh orangtua kepada anaknya yang hendak menikah.

Pepatah *aja ngerubuhkan jajang sebarong* ini juga jadi semacam *reminder* bagi masyarakat Using agar seperlunya saja dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada. *Jajang* (bambu) sekalipun adalah material yang penting dalam pembuatan angklung, hendaknya diambil sebagian, jangan seluruh rumpun. Keberlanjutan antar-generasi menjadi pesan tersirat dalam pesan *aja ngerubuhkan jajang sebarong* ini: baik keberlanjutan generasi bambu itu sendiri, juga keberlanjutan generasi masyarakat Using.

Pemanfaatan Pohon Bendo dan Bambu sebagai vegetasi pengaman perengan, menurut tokoh adat masyarakat Desa Kemiren Adi Purwadi juga mengandung makna keberlanjutan antar-generasi⁵. “*Wong Using iku ngerawat perengan, hing cuma gawe awake dewe, tapi gawe anak-putu mbisuk* (Wong Using itu merawat lereng, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-cucu nantinya)” ujar pengelola Rumah Budaya Osing yang akrab dipanggil Kang Pur.

Interaksi masyarakat Using dengan alam tempat mereka hidup, menurut Kang Pur, membuat masyarakat Using belajar tentang sikap apakah yang tepat untuk dilakukan agar hubungan manusia dan alamnya tak saling mencelakakan. Tanah dan air yang dianggap telah memberikan jasa bagi keberlangsungan hidup, oleh masyarakat Using dianggap sebagai makhluk yang bisa bereaksi dan perlu diberi kesempatan untuk istirahat.

³ Wawancara 3 Desember 2017

⁴ Wawancara 12 April 2018

⁵ Wawancara 9 April 2018

Mbalong disebut Kang Pur sebagai upaya masyarakat Using untuk memberi istirahat bagi tanah. Pada perhitungan tertentu, akan tiba masa pasca-panen, tanah diistirahatkan tanpa ditanami apa-apa. Didiamkan dengan maksud memberi kesempatan bagi tanah untuk memulihkan dirinya. Memberi kesempatan kepada tanah untuk beristirahat inilah yang dinamakan *mbalong*. Menurut Kang Pur, *mbalong* dilakukan tidak hanya agar petani untung karena pulihnya tanah mereka, tetapi lebih dari itu, karena tanah disikapi sebagai makhluk yang punya kebutuhan, dan kebutuhan makhluk salah satunya adalah istirahat.

Setiap makhluk punya kebutuhan, dan salah satu kebutuhan tersebut adalah istirahat. Berangkat dari konsepsi itu pula, menurut Kang Pur, air tidak diakses masyarakat Using pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Hari Rabu terakhir di bulan Safar ini ada yang menyebutnya Rebo Pungkasan, ada juga yang menamainya Rebo Wekasan.

Pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, masyarakat Using tidak akan mengakses air: mereka tidak pergi ke mata air, juga tak pergi ke sungai. Itulah mengapa, menurut Kang Pur, masyarakat Using pada hari sebelumnya (hari Selasa terakhir di bulan Safar) mengumpulkan air sebanyak-banyaknya dan menyimpannya di rumah (karena besok pada hari Rabu dilarang mendatangi sungai dan mata air). Menurut Kang Pur, tradisi ini dimaksudkan memberi kesempatan kepada istirahat kepada air untuk istirahat.

Sudut pandang masyarakat Using yang menganggap tanah dan air serupa makhluk hidup yang butuh istirahat, menurut penulis adalah sebuah sikap komunal yang menganggap alam sebagai ruang hidup yang mesti diperlakukan secara respek. Tentu sikap ini berbenturan dengan cara pandang penganut kapitalisme dan neoliberalisme yang hanya memandang alam sebagai aset atau komoditas belaka. Karena dipandang sebagai aset dan komoditas, maka alam diperlukan sebagai “barang” yang bisa diperjualbelikan tanpa memperhitungkan aspek sejarah, dan aspek keselamatan warga yang hidup di dalamnya.

Sudut pandang masyarakat Using menganggap tanah dan air serupa makhluk hidup yang butuh istirahat, menurut penulis adalah sebuah sikap yang sejalan dengan ungkapan *aja ngerubuhaken jajang sebarong*. Tanah dan air hendaklah dimanfaatkan secukupnya, jangan berlebihan, karena—sebagai makhluk—tanah dan air akan memberikan reaksi negatif (baca: bencana) ketika diperlakukan secara over-eksploitatif.

Aja ngerubuhaken jajang sebarong adalah pesan tentang bagaimana kita tetap bisa mengambil manfaat dari alam tanpa over-eksploitatif. *aja ngerubuhaken jajang sebarong* adalah juga pesan tersirat agar masyarakat Using bisa secara cerdas memilih sumber-sumber kekayaan alam (sumber-sumber agraria) yang berdaya pulih. Mengapa kita tak boleh *ngerubuhaken jajang sebarong* (merobohkan bambu serumpun) karena bambu satu rumpun yang dibongkar akan memiliki daya pulih yang rendah dibanding bambu yang dibongkar secukupnya.

Pesan tersirat untuk memilih sumber agraria yang berdaya pulih ini bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana perilaku kita saat ini. Sudahkah kita memilih sumber agraria berdaya pulih? Sayangnya tidak. Bukti fenomenal tentang ketidaktepatan tersebut ada di

Kecamatan Pesanggaran. Tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu adalah contoh kegiatan eksploitatif yang tak berdaya pulih.

Ungkapan *aja ngerubuhkan jajang sebarong* ini sebenarnya secara tersirat merupakan pesan bahwa kebersamaan adalah kekuatan masyarakat Using yang harus dijaga. Jadi dengan demikian faktor-faktor pemicu lahirnya sikap individualistik mesti dihindari. Atau bisa juga dimaknai *aja ngerubuhkan jajang sebarong* adalah semacam *warning* dari leluhur masyarakat Using bahwa sikap individualistik akan jadi pemicu kehancuran Banyuwangi.

Dari *warning* yang tersirat dalam pesan *aja ngerubuhkan jajang sebarong*, kita bisa menghitung kegiatan atau keputusan apakah yang justru memuluskan lahirnya sikap individualistik? kegiatan atau keputusan apakah yang justru merobek kebersamaan?

Jika kita ingin mengetahui kegiatan atau keputusan yang merobek kebersamaan, kita bisa memulainya dengan “menginventarisasi” mana saja sumber-sumber agraria kita yang bersifat komunal. Apa saja *public good* (benda/fasilitas milik publik) yang kita miliki? Dari sekian *public good* yang kita miliki, hingga hari ini sudah berapakah yang statusnya tetap sebagai *public good*, dan berapakah yang sudah berubah jadi *private good* (benda/fasilitas milik pribadi).

Mata air, sungai, pantai, gunung, hutan adalah *public good* (milik bersama). Ketika pantai-pantai di Banyuwangi berubah jadi *private good*, maka pada saat itulah neoliberalisme bekerja. Ketika mata air- mata air di Banyuwangi berubah dari milik bersama jadi milik pribadi, maka pada saat itulah neoliberalisme juga sedang bekerja. Karena neoliberalisme memandang alam hanya sebagai aset dan komoditas belaka, alam tak dianggap sebagai ruang hidup yang perlu diperlakukan secara hati-hati dan berkelanjutan, dengan demikian pada gilirannya nanti laju privatisasi di Banyuwangi akan berujung pada ketimpangan ekologi.

Aja ngerubuhkan jajang sebarong juga bisa kita pakai untuk membedakan gunung-gunung yang kita miliki. Lewat pesan *aja ngerubuhkan jajang sebarong*, semestinya gunung pun terhindar dari kegiatan over-eksploitasi. Tetapi sudahkah hal tersebut terjadi? Lagi-lagi, sayangnya tidak. Apalagi jika ditarik kepada keadaan terkini Gunung Ijen. Hingga hari ini belum ada riset daya dukung kawasan Ijen yang secara fair hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat. Riset daya dukung kawasan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara ilmiah berapa batas kekuatan sebuah kawasan menampung populasi manusia dalam satu hari. Jika ada riset daya dukung kawasan yang secara adil, jujur, dan objektif dilakukan di Ijen, maka secara ilmiah kita bisa menentukan kuota kunjungan wisatawan, sekaligus sebagai tolok ukur objektif: apakah kegiatan wisata di Ijen sudah melampaui daya dukung kawasan atautah tidak. Tidak adanya riset daya dukung kawasan ini pula yang menjadi pejabat pengambil keputusan meng-klaim keputusannya tidak over-eksploitatif: Contohnya bagaimana Kepala BBKSDA Jatim meyakini bahwa keputusannya membangun sebuah fasilitas di bibir kawah Ijen sebagai sebuah tindakan yang tidak mengganggu ekologi. Tidak adanya riset daya dukung kawasan ini pula yang membuat Menteri Pariwisata meyakini bahwa proyek pembangunan kereta gantung di Ijen hanyalah proyek “yang merusak sedikit”. Kita menjadi kesulitan mengukur secara

presisi apakah pernyataan “merusak sedikit” itu benar-benar sedikit ataukah sudah menabrak daya dukung kawasan.

Tidak adanya riset daya dukung kawasan ini pula, yang menjadikan Medco bisa begitu mulusnya mendapatkan kapling seluas 60 ribu hektar lebih untuk proyek geotermal di Ijen. Gunung Ijen adalah *public good*, tetapi keputusan pemerintah telah membuat Gunung Ijen jadi *private good* bagi Medco.

Jika pepatah *aja ngerubuhkan jajang sebarong* kita pandang sebagai pesan tersirat dari leluhur agar kita menjaga kebersamaan, tidak over-eksploitatif, dan agar kita memilih sumber-sumber agraria yang berdaya pulih, maka kita bisa menakar regulasi dan strategi kebudayaan yang diputuskan pemerintah Banyuwangi hari ini.

Apakah regulasi yang ada menguatkan kebersamaan ataukah justru merapuhkan? Kita bisa memeriksanya lewat berapa banyak *public good* berubah jadi *public good*. Apakah strategi kebudayaan pemerintah Banyuwangi menyokong laju privatisasi ataukah tidak?

Karena itu, mari kita diskusi.

Penataban, 14 April 2018